

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011-2015 adalah sebesar 12,178%. Ini menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Pusat sangat dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Peran pemerintah pusat yang masih sangat dominan, wajar jika Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo masih kurang. Ini terlihat dari rata-rata rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 5 tahun hanya berjumlah 10,564% . Artinya, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

3. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo terbilang sangat efektif. Ini terlihat dari tingginya angka rata-rata Rasio Efektifitas yang berjumlah 114,330% selama 5 periode anggaran.
4. Rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo terbilang tidak efisien. Ini terlihat dari rata-rata Rasio Efisiensi yang masih tinggi sebesar 995,258% selama 5 periode anggaran.
5. Rasio Keceragaman Belanja menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang. Terbukti dari perhitungannya rasio belanja tidak langsung dan rasio belanja langsung. Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung Lebih Besar dari Belanja Tidak Langsung
6. Rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memang belum sangat optimal, namun sudah terlihat sedikit ada perbaikan selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2014 dan 2015 rasio belanja pembangunan (belanja modal) mengalami peningkatan. Ini artinya pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah mulai memprioritaskan belanja pembangunan guna memperbaiki pembangunan struktur dan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo harus mulai untuk tidak tergantung lagi kepada pemerintah pusat dan mulai mengoptimalkan sumber daya alam yang ada sehingga pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah bisa semakin meningkat.
2. Pemerintah daerah Kulon Progo seharusnya dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya sehingga kedepannya dapat meningkatkan efisiensi belanja daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya lebih meningkatkan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja pembangunan (belanja modal), sehingga pembangunan di Kabupaten Kulon Progo semakin baik dan bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.